



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

Nomor : T/KP.04.02/019/KRU/V/2023 Jakarta, 08 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Daftar IKI Mandatory dalam SKP Jabatan Fungsional
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Yth. Bapak/ Ibu (mohon periksa daftar lampiran)
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-39/PB.7/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja Individu (IKI) Mandatory bagi JF APK APBN dan JF PK APBN di Kementerian Negara/Lembaga, bersama dengan ini kami sampaikan daftar Indikator Kinerja Individu (IKI) Mandatory yang dimaksud (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat menyampaikan daftar IKI mandatory Tahun 2023 tersebut kepada Pejabat Fungsional APK APBN dan Pejabat Fungsional PK APBN di lingkungan unit kerja Bapak/Ibu, dengan maksud dapat dipedomani dalam penetapan SKP tahun 2023.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Petrus Demon Sili

Tembusan :
Sekretaris Utama (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : T/KP.04.02/019/KRU/V/2023
Tanggal : 08 Mei 2023

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI PENERIMA SURAT

1. Inspektur
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
4. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
5. Kepala Balai Besar Wilayah I s/d V MKG
6. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I-IV
7. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I-IV
8. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I-IV
9. Kepala Stasiun GA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670;
Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-39/PB.7/2023 31 Januari 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja Individu (IKI) Mandatory Tahun 2023 Bagi JF
APK APBN dan JF PK APBN di Kementerian Negara/Lembaga

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
2. Kepala Biro Keuangan
pada Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir)

Sehubungan dengan implementasi PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Angka Kredit Pejabat Fungsional mulai Tahun 2023 diperoleh dari konversi predikat kinerja yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja (Atasan Langsung Pejabat Fungsional), baik secara periodik maupun tahunan.
2. Dalam rangka menjaga kualitas kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (JF PK APBN) serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN agar dapat berjalan efektif dan efisien, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina telah menyusun daftar Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023 bagi JF APK APBN dan JF PK APBN (daftar IKI dapat diakses pada https://bit.ly/IKI_Mandatory_JFPKAPBN_JFAPKAPBN_2023).
3. IKI sebagaimana dimaksud pada Angka 2 bersifat mandatory untuk dimasukkan dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 bagi JF APK APBN dan JF PK APBN sesuai dengan penugasan dalam pengelolaan keuangan APBN (PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, dan/atau Penyusun LK), menambahkan IKI Utama lain yang merupakan penugasan dari pimpinan.
4. Dalam hal pimpinan JF APK APBN dan JF PK APBN memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait target dan formula IKI sebagaimana tercantum dalam daftar IKI, target dan formula dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan IKI.
5. Berkenaan dengan hal dimaksud, dimohon bantuan Saudara/i untuk dapat menyampaikan daftar IKI mandatory Tahun 2023 tersebut kepada Pejabat Fungsional APK APBN dan Pejabat Fungsional PK APBN lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara/i, dengan maksud dapat dipedomani dalam penetapan SKP tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

Tembusan:

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
2. Para Kepala KPPN



DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Informasi Geospasial
3. Badan Keamanan Laut
4. Badan Kepegawaian Negara
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
7. Badan Narkotika Nasional
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
12. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
13. Badan Pemeriksa Keuangan
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
18. Badan Pusat Statistik
19. Badan Riset dan Inovasi Nasional
20. Badan Siber dan Sandi Negara
21. Badan Standardisasi Nasional
22. Dewan Ketahanan Nasional
23. Kejaksaan Republik Indonesia
24. Kementerian Agama
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
26. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
27. Kementerian Dalam Negeri
28. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
29. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
30. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
31. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
32. Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. Kementerian Kesehatan
34. Kementerian Ketenagakerjaan
35. Kementerian Keuangan
36. Kementerian Komunikasi dan Informatika
37. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
38. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

39. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
40. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
41. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
44. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
45. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
46. Kementerian Pemuda dan Olahraga
47. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
48. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
49. Kementerian Perdagangan
50. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
51. Kementerian Perhubungan
52. Kementerian Perindustrian
53. Kementerian Pertanian
54. Kementerian Sekretariat Negara
55. Kementerian Sosial
56. Komisi Pemberantasan Korupsi
57. Komisi Pemilihan Umum
58. Komisi Yudisial RI
59. Lembaga Administrasi Negara
60. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
61. Lembaga Ketahanan Nasional
62. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
63. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
64. Mahkamah Agung
65. Ombudsman Republik Indonesia
66. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
67. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
68. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

